



BUPATI MUARA ENIM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI MUARA ENIM
NOMOR **45** TAHUN 2024

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
6. Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 91 Tahun 2024 tentang Kabupaten Muara Enim di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 277, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);

16. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1781);
20. Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2024 Nomor 19);
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 715);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
23. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 8);
24. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2021 Nomor 6);
25. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2024 Nomor 2);
26. Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2021 Nomor 14);
27. Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2023 Nomor 4);
28. Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2023 Nomor 15);
29. Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2024 Nomor 19);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Muara Enim.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp3.465.248.542.570,00 yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp405.240.114.895,00 yang terdiri atas:
 - a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp176.554.363.649,00.
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp181.675.372.317,00.
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp41.920.177.244,00.

- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp5.090.201.685,00.

Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp176.554.363.649,00 yang terdiri atas:
- a. pajak reklame;
 - b. pajak air tanah;
 - c. pajak sarang burung walet;
 - d. pajak mineral bukan logam dan batuan;
 - e. pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2);
 - f. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB);
 - g. pajak barang dan jasa tertentu (PBJT);
 - h. opsen pajak kendaraan bermotor (PKB); dan
 - i. opsen bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB).
- (2) Pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp835.792.800,00.
- (3) Pajak air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp519.192.500,00.
- (4) Pajak sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp53.525.000,00.
- (5) Pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp16.057.499.700,00.
- (6) Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp12.565.155.415,00.
- (7) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp14.451.750.000,00.
- (8) Pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp56.476.614.890,00.
- (9) Opsi pajak kendaraan bermotor (PKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp31.706.762.903,00.

- (10) Opsen bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp43.888.070.441,00.

Pasal 6

- (1) Anggaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp181.675.372.317,00 yang terdiri atas:
- a. retribusi jasa umum;
 - b. retribusi jasa usaha; dan
 - c. retribusi perizinan tertentu.
- (2) Anggaran retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp174.348.923.829,00.
- (3) Anggaran retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.650.095.988,00.
- (4) Anggaran retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp4.676.352.500,00.

Pasal 7

- (1) Anggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp41.920.177.244,00 yang terdiri atas:
- a. bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (dividen) atas penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Negara;
 - b. bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (dividen) atas penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah; dan
 - c. bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (dividen) atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Swasta.
- (2) Bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (dividen) atas penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp25.130.150.056,00.
- (3) Bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp16.681.906.688,00.

- (4) Bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (dividen) atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp108.120.500,00.

Pasal 8

- (1) Anggaran lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp5.090.201.685,00 yang terdiri atas:
 - a. hasil penjualan Barang Milik Daerah yang tidak dipisahkan;
 - b. hasil pemanfaatan Barang Milik Daerah yang tidak dipisahkan;
 - c. jasa giro;
 - d. pendapatan denda pajak daerah; dan
 - e. pendapatan Badan Layanan Umum Daerah.
- (2) Anggaran hasil penjualan Barang Milik Daerah yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp279.942.500,00.
- (3) Anggaran hasil pemanfaatan Barang Milik Daerah yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.190.000.000,00.
- (4) Anggaran jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp4.281.080.000,00.
- (5) Anggaran pendapatan denda pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp259.179.185,00.
- (6) Anggaran pendapatan Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp80.000.000,00.

Pasal 9

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp3.051.527.356.325,00 yang terdiri atas:
 - a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antar daerah.

- (2) Anggaran pendapatan transfer pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.870.620.426.342,00.
- (3) Anggaran pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp180.906.929.983,00.

Pasal 10

- (1) Anggaran lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp8.481.071.350,00 yang terdiri atas:
 - a. pendapatan hibah; dan
 - b. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- (2) Anggaran pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.195.000.000,00.
- (3) Anggaran lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp7.286.071.350,00.

Pasal 11

Anggaran belanja daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp3.616.508.009.716,00 yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

Pasal 12

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a direncanakan sebesar Rp2.338.412.580.663,00 yang terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja bunga;
 - d. belanja hibah; dan
 - e. belanja bantuan sosial.

- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.199.154.726.265,00.
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.026.819.656.322,00.
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp7.000.000.000,00.
- (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp75.493.238.000,00.
- (6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp3.709.500.000,00.

Pasal 13

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.199.154.726.265,00 yang terdiri atas:
 - a. belanja gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara;
 - b. belanja tambahan penghasilan Aparatur Sipil Negara;
 - c. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
 - d. belanja gaji dan tunjangan Bupati dan Wakil Bupati; dan
 - e. belanja penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta Bupati dan Wakil Bupati.
- (2) Belanja gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp682.367.157.893,00.
- (3) Belanja tambahan penghasilan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp424.859.948.367,00.
- (4) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp25.757.861.972,00.
- (5) Belanja gaji dan tunjangan Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp180.696.229,00.
- (6) Belanja penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.577.191.304,00.

Pasal 14

- (1) Belanja gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp682.367.157.893,00 yang terdiri atas:
 - a. belanja gaji pokok Aparatur Sipil Negara;
 - b. belanja tunjangan keluarga Aparatur Sipil Negara;
 - c. belanja tunjangan jabatan Aparatur Sipil Negara;
 - d. belanja tunjangan fungsional Aparatur Sipil Negara;
 - e. belanja tunjangan fungsional umum Aparatur Sipil Negara;
 - f. belanja tunjangan beras Aparatur Sipil Negara;
 - g. belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus Aparatur Sipil Negara;
 - h. belanja pembulatan gaji Aparatur Sipil Negara;
 - i. belanja iuran jaminan kesehatan Aparatur Sipil Negara;
 - j. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja Aparatur Sipil Negara; dan
 - k. belanja iuran jaminan kematian Aparatur Sipil Negara.
- (2) Belanja gaji pokok Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp494.978.173.338,00.
- (3) Belanja tunjangan keluarga Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp52.911.375.675,00.
- (4) Belanja tunjangan jabatan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp8.836.254.475,00.
- (5) Belanja tunjangan fungsional Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp28.825.139.244,00.
- (6) Belanja tunjangan fungsional umum Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp12.210.932.396,00.
- (7) Belanja tunjangan beras Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp30.945.509.414,00.
- (8) Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp1.565.290.431,00.

- (9) Belanja pembulatan gaji Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp21.609.629,40.
- (10) Belanja iuran jaminan kesehatan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp46.781.196.490,00.
- (11) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp1.322.896.900,00.
- (12) Belanja iuran jaminan kematian Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp3.968.779.900,00.

Pasal 15

Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2025, yang terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 16

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a direncanakan sebesar Rp157.537.983.278,00 yang terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp157.537.983.278,00 yang berasal dari penghematan belanja.

Pasal 18

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah sebesar Rp151.259.467.146,00.
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp151.259.467.146,00.

Pasal 19

Uraian lebih lanjut APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari:

- a. Lampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasikan Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- c. Lampiran III.a Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Hibah Berupa Uang Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Hibah;
- d. Lampiran III.b Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Hibah Berupa Barang Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Hibah;
- e. Lampiran IV.a Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial Berupa Uang Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial;
- f. Lampiran IV.b Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial Berupa Barang Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial;
- g. Lampiran V.a Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Umum Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan;
- h. Lampiran V.b Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan;
- i. Lampiran VI.a Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten;

- j. Lampiran VI.b Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kota;
- k. Lampiran VI.c Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa;
- l. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- m. Lampiran VIII Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.

Pasal 20

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 21

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.

Pasal 22

Peraturan Bupati Muara Enim ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal **30** Desember 2024,

Pj. BUPATI MUARA ENIM,



HENKY PUTRAWAN

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal **30** Desember 2024,

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM,



YULIUS

BERITA DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2024 NOMOR **45**



Lampiran I : Peraturan Bupati
Nomor : 45 Tahun 2024
Tanggal : 30 Desember 2024

KABUPATEN MUARA ENIM
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN
PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2025

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	405.240.114.895,00
4.1.01	Pajak Daerah	176.554.363.649,00
4.1.01.09	Pajak Reklame	835.792.800,00
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	567.365.000,00
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	567.365.000,00
4.1.01.09.02	Pajak Reklame Kain	214.100.000,00
4.1.01.09.02.0001	Pajak Reklame Kain	214.100.000,00
4.1.01.09.03	Pajak Reklame Melekat/Stiker	53.525.000,00
4.1.01.09.03.0001	Pajak Reklame Melekat/Stiker	53.525.000,00
4.1.01.09.05	Pajak Reklame Berjalan	802.800,00
4.1.01.09.05.0001	Pajak Reklame Berjalan	802.800,00
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	519.192.500,00
4.1.01.12.01	Pajak Air Tanah	519.192.500,00
4.1.01.12.01.0001	Pajak Air Tanah	519.192.500,00
4.1.01.13	Pajak Sarang Burung Walet	53.525.000,00
4.1.01.13.01	Pajak Sarang Burung Walet	53.525.000,00
4.1.01.13.01.0001	Pajak Sarang Burung Walet	53.525.000,00
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	16.057.499.700,00
4.1.01.14.37	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	16.057.499.700,00
4.1.01.14.37.0001	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	16.057.499.700,00
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	12.565.155.415,00
4.1.01.15.01	PBBP2	12.565.155.415,00
4.1.01.15.01.0001	PBBP2	12.565.155.415,00
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	14.451.750.000,00
4.1.01.16.01	BPHTB-Pemindahan Hak	2.141.000.000,00
4.1.01.16.01.0001	BPHTB-Pemindahan Hak	2.141.000.000,00
4.1.01.16.02	BPHTB-Pemberian Hak Baru	12.310.750.000,00
4.1.01.16.02.0001	BPHTB-Pemberian Hak Baru	12.310.750.000,00
4.1.01.19	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	56.476.614.890,00
4.1.01.19.01	PBJT-Makanan dan/atau Minuman	15.073.803.500,00
4.1.01.19.01.0001	PBJT-Restoran	7.562.457.800,00
4.1.01.19.01.0002	PBJT-Penyedia Jasa Boga atau Katering	7.511.345.700,00
4.1.01.19.02	PBJT-Tenaga Listrik	38.700.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.1.01.19.02.0001	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	30.000.000.000,00
4.1.01.19.02.0002	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri	8.700.000.000,00
4.1.01.19.03	PBJT-Jasa Perhotelan	2.252.800.040,00
4.1.01.19.03.0001	PBJT-Hotel	2.162.909.150,00
4.1.01.19.03.0006	PBJT-Losmen	46.688.090,00
4.1.01.19.03.0010	PBJT-Tempat Tinggal Pribadi yang Difungsikan sebagai Hotel	43.202.800,00
4.1.01.19.04	PBJT-Jasa Parkir	21.410.000,00
4.1.01.19.04.0001	PBJT-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir	21.410.000,00
4.1.01.19.05	PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan	428.601.350,00
4.1.01.19.05.0002	PBJT-Pergelaran Kesenian, Musik, Tari, dan/atau Busana	107.050.000,00
4.1.01.19.05.0008	PBJT-Permainan Ketangkasan	1.605.750,00
4.1.01.19.05.0009	PBJT-Olahraga Permainan dengan Menggunakan Tempat/Ruang dan/atau Peralatan dan Perlengkapan untuk Olahraga dan Kebugaran	8.430.100,00
4.1.01.19.05.0011	PBJT-Panti Pijat dan Pijat Refleksi	3.211.500,00
4.1.01.19.05.0012	PBJT-Distkotek, Karaoke, Kelab Malam, Bar, dan Mandi Uap/Spa	308.304.000,00
4.1.01.20	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	31.706.762.903,00
4.1.01.20.01	Opsen PKB	31.706.762.903,00
4.1.01.20.01.0001	Opsen PKB	31.706.762.903,00
4.1.01.21	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	43.888.070.441,00
4.1.01.21.01	Opsen BBNKB	43.888.070.441,00
4.1.01.21.01.0001	Opsen BBNKB	43.888.070.441,00
4.1.02	Retribusi Daerah	181.675.372.317,00
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	174.348.923.829,00
4.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	171.146.767.188,00
4.1.02.01.01.0001	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	57.673.767.188,00
4.1.02.01.01.0005	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	113.473.000.000,00
4.1.02.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	558.672.540,00
4.1.02.01.02.0001	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	558.672.540,00
4.1.02.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	450.705.121,00
4.1.02.01.04.0001	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	450.705.121,00
4.1.02.01.05	Retribusi Pelayanan Pasar	2.140.528.980,00
4.1.02.01.05.0001	Retribusi Pelataran	244.800.000,00
4.1.02.01.05.0002	Retribusi Los	1.047.360.000,00
4.1.02.01.05.0003	Retribusi Kios	848.368.980,00
4.1.02.01.09	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	52.250.000,00
4.1.02.01.09.0001	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	52.250.000,00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	2.650.095.988,00
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	649.946.238,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.1.02.02.01.0003	Retribusi Penyewaan Bangunan	32.217.768,00
4.1.02.02.01.0004	Retribusi Pemakaian Laboratorium	0,00
4.1.02.02.01.0006	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	617.728.470,00
4.1.02.02.04	Retribusi Terminal	105.765.400,00
4.1.02.02.04.0003	Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal	105.765.400,00
4.1.02.02.05	Retribusi Tempat Khusus Parkir	12.846.000,00
4.1.02.02.05.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	12.846.000,00
4.1.02.02.06	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	10.705.000,00
4.1.02.02.06.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	10.705.000,00
4.1.02.02.07	Retribusi Rumah Potong Hewan	160.575.000,00
4.1.02.02.07.0001	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan	160.575.000,00
4.1.02.02.08	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	30.723.350,00
4.1.02.02.08.0001	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	30.723.350,00
4.1.02.02.09	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	289.035.000,00
4.1.02.02.09.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	289.035.000,00
4.1.02.02.11	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	320.000.000,00
4.1.02.02.11.0003	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan	320.000.000,00
4.1.02.02.20	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	1.070.500.000,00
4.1.02.02.20.0001	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	1.070.500.000,00
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	4.676.352.500,00
4.1.02.03.07	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	2.676.250.000,00
4.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	2.676.250.000,00
4.1.02.03.08	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	2.000.102.500,00
4.1.02.03.08.0001	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	2.000.102.500,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	41.920.177.244,00
4.1.03.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN	25.130.150.056,00
4.1.03.01.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN	25.130.150.056,00
4.1.03.01.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN	25.130.150.056,00
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	16.681.906.688,00
4.1.03.02.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	16.681.906.688,00
4.1.03.02.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	16.681.906.688,00
4.1.03.03	Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta	108.120.500,00
4.1.03.03.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta	108.120.500,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.1.03.03.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta	108.120.500,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	5.090.201.685,00
4.1.04.01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	279.942.500,00
4.1.04.01.05	Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya	279.942.500,00
4.1.04.01.05.0064	Hasil Penjualan Tanaman-Tanaman-Tanaman	79.942.500,00
4.1.04.01.05.0071	Hasil Penjualan Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya Lainnya	200.000.000,00
4.1.04.03	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	190.000.000,00
4.1.04.03.01	Hasil Sewa BMD	190.000.000,00
4.1.04.03.01.0001	Hasil Sewa BMD	190.000.000,00
4.1.04.05	Jasa Giro	4.281.080.000,00
4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	4.067.900.000,00
4.1.04.05.01.0001	Jasa Giro pada Kas Daerah	4.067.900.000,00
4.1.04.05.02	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	213.180.000,00
4.1.04.05.02.0001	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	213.180.000,00
4.1.04.12	Pendapatan Denda Pajak Daerah	259.179.185,00
4.1.04.12.06	Pendapatan Denda Pajak Hotel	1.016.975,00
4.1.04.12.06.0001	Pendapatan Denda Pajak Hotel	1.016.975,00
4.1.04.12.07	Pendapatan Denda Pajak Restoran	107.050.000,00
4.1.04.12.07.0001	Pendapatan Denda Pajak Restoran dan Sejenisnya	107.050.000,00
4.1.04.12.08	Pendapatan Denda Pajak Hiburan	1.605.750,00
4.1.04.12.08.0002	Pendapatan Denda Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana	160.575,00
4.1.04.12.08.0005	Pendapatan Denda Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	642.300,00
4.1.04.12.08.0008	Pendapatan Denda Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	160.575,00
4.1.04.12.08.0009	Pendapatan Denda Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa, dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	642.300,00
4.1.04.12.09	Pendapatan Denda Pajak Reklame	24.621.500,00
4.1.04.12.09.0001	Pendapatan Denda Pajak Reklame Papan/ Billboard/Videotron/Megatron	16.967.425,00
4.1.04.12.09.0002	Pendapatan Denda Pajak Reklame Kain	5.352.500,00
4.1.04.12.09.0003	Pendapatan Denda Pajak Reklame Melekat/Stiker	2.141.000,00
4.1.04.12.09.0005	Pendapatan Denda Pajak Reklame Berjalan	160.575,00
4.1.04.12.10	Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan	160.575,00
4.1.04.12.10.0001	Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	36.000,00
4.1.04.12.10.0002	Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	124.575,00
4.1.04.12.12	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	1.605.750,00
4.1.04.12.12.0001	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	1.605.750,00
4.1.04.12.13	Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet	11.135,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.1.04.12.13.0001	Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet	11.135,00
4.1.04.12.15	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	5.352.500,00
4.1.04.12.15.0001	Pendapatan Denda PBBP2	5.352.500,00
4.1.04.12.16	Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	117.755.000,00
4.1.04.12.16.0001	Pendapatan Denda BPHTB-Pemindahan Hak	32.115.000,00
4.1.04.12.16.0002	Pendapatan Denda BPHTB-Pemberian Hak Baru	85.640.000,00
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	80.000.000,00
4.1.04.16.02	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	80.000.000,00
4.1.04.16.02.0001	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	80.000.000,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	3.051.527.356.325,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.870.620.426.342,00
4.2.01.05	Dana Desa	216.038.404.000,00
4.2.01.05.01	Dana Desa	216.038.404.000,00
4.2.01.05.01.0001	Dana Desa	216.038.404.000,00
4.2.01.07	Dana Bagi Hasil (DBH)	1.646.331.891.342,00
4.2.01.07.01	DBH Pajak	600.872.791.137,00
4.2.01.07.01.0001	DBH PBB	557.410.588.385,00
4.2.01.07.01.0002	DBH PPh Pasal 21	42.381.839.227,00
4.2.01.07.01.0003	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	1.080.363.525,00
4.2.01.07.01.0004	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	0,00
4.2.01.07.02	DBH Sumber Daya Alam (SDA)	1.041.018.834.205,00
4.2.01.07.02.0001	DBH SDA Minyak Bumi	10.815.918.460,00
4.2.01.07.02.0002	DBH SDA Gas Bumi	21.739.269.445,00
4.2.01.07.02.0003	DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi	5.138.609.000,00
4.2.01.07.02.0004	DBH SDA Mineral dan Batubara-Landrent	3.272.519.965,00
4.2.01.07.02.0005	DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty	998.310.306.335,00
4.2.01.07.02.0006	DBH SDA Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	908.406.000,00
4.2.01.07.02.0009	DBH SDA Perikanan	833.805.000,00
4.2.01.07.03	DBH Lainnya	4.440.266.000,00
4.2.01.07.03.0001	DBH Sawit	4.440.266.000,00
4.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	710.569.784.000,00
4.2.01.08.01	DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya	473.992.405.000,00
4.2.01.08.01.0001	DAU	473.992.405.000,00
4.2.01.08.02	DAU yang Ditentukan Penggunaannya	236.577.379.000,00
4.2.01.08.02.0001	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	2.000.000.000,00
4.2.01.08.02.0003	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	119.204.837.000,00
4.2.01.08.02.0004	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	47.967.748.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.2.01.08.02.0005	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	54.467.953.000,00
4.2.01.08.02.0006	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	12.936.841.000,00
4.2.01.09	Dana Alokasi Khusus (DAK)	297.680.347.000,00
4.2.01.09.02	DAK Non Fisik	297.680.347.000,00
4.2.01.09.02.0001	DAK Non Fisik-BOS Reguler	297.680.347.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	180.906.929.983,00
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	180.906.929.983,00
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	180.906.929.983,00
4.2.02.01.01.0003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	148.385.201.599,00
4.2.02.01.01.0004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	900.397.709,00
4.2.02.01.01.0005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	31.621.330.675,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	8.481.071.350,00
4.3.01	Pendapatan Hibah	1.195.000.000,00
4.3.01.03	Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri	225.000.000,00
4.3.01.03.01	Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri	225.000.000,00
4.3.01.03.01.0001	Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat Dalam Negeri/Perorangan dalam Negeri	225.000.000,00
4.3.01.04	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri	970.000.000,00
4.3.01.04.01	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri	970.000.000,00
4.3.01.04.01.0001	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri	970.000.000,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	7.286.071.350,00
4.3.03.01	Lain-lain Pendapatan	7.286.071.350,00
4.3.03.01.02	Pendapatan atas Pengembalian Hibah	7.286.071.350,00
4.3.03.01.02.0005	Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan hukum Indonesia	7.286.071.350,00
	Jumlah Pendapatan	3.465.248.542.570,00
5	BELANJA DAERAH	
5.1	BELANJA OPERASI	2.312.177.120.587,00
5.1.01	Belanja Pegawai	1.199.154.726.265,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	682.367.157.893,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	494.978.173.338,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	325.388.822.306,00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	169.589.351.032,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	52.911.375.675,60
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	33.533.599.175,60
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	19.377.776.500,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	8.836.254.475,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	8.836.254.475,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	28.825.139.244,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	28.803.259.119,00
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	21.880.125,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	12.210.932.396,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	3.766.197.453,00
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	8.444.734.943,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	30.945.509.414,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	18.228.999.220,00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	12.716.510.194,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	1.565.290.431,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1.260.400.912,00
5.1.01.01.07.0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	304.889.519,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	21.609.629,40
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	10.481.971,00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	11.127.658,40
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	46.781.196.490,00
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	27.314.072.300,00
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	19.467.124.190,00
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	1.322.896.900,00
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1.092.626.700,00
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	230.270.200,00
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	3.968.779.900,00
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	3.277.969.600,00
5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	690.810.300,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	424.859.948.367,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	279.928.519.529,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	190.332.829.365,00
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	89.595.690.164,00
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	21.459.561.760,00
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	18.950.063.744,00
5.1.01.02.03.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PPPK	2.509.498.016,00
5.1.01.02.04	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	6.479.981.824,00
5.1.01.02.04.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	6.364.408.786,00
5.1.01.02.04.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PPPK	115.573.038,00
5.1.01.02.06	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	116.991.885.254,00
5.1.01.02.06.0009	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Reklame	41.101.605,00
5.1.01.02.06.0012	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Air Tanah	25.532.219,00
5.1.01.02.06.0013	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Sarang Burung Walet	2.632.188,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.02.06.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	789.656.239,00
5.1.01.02.06.0015	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	628.257.771,00
5.1.01.02.06.0016	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	710.690.625,00
5.1.01.02.06.0019	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	2.713.183.215,00
5.1.01.02.06.0022	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan	2.807.704,00
5.1.01.02.06.0023	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	22.909.595,00
5.1.01.02.06.0025	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	16.901.442,00
5.1.01.02.06.0026	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	80.269.837,00
5.1.01.02.06.0035	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	52.172.531,00
5.1.01.02.06.0038	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Terminal	3.966.203,00
5.1.01.02.06.0041	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan	6.021.563,00
5.1.01.02.06.0042	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Kepelabuhanan	1.152.126,00
5.1.01.02.06.0043	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga	23.584.453,00
5.1.01.02.06.0048	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Usaha Perikanan	12.000.000,00
5.1.01.02.06.0050	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung	100.359.375,00
5.1.01.02.06.0051	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Perizinan Tertentu-Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	75.003.844,00
5.1.01.02.06.0057	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan	481.725,00
5.1.01.02.06.0062	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah	12.000.000,00
5.1.01.02.06.0064	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	105.809.146.994,00
5.1.01.02.06.0066	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	5.862.054.000,00
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	25.757.861.972,00
5.1.01.04.01	Belanja Uang Representasi DPRD	1.004.010.000,00
5.1.01.04.01.0001	Belanja Uang Representasi DPRD	1.004.010.000,00
5.1.01.04.02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	144.481.200,00
5.1.01.04.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	144.481.200,00
5.1.01.04.03	Belanja Tunjangan Beras DPRD	156.427.200,00
5.1.01.04.03.0001	Belanja Tunjangan Beras DPRD	156.427.200,00
5.1.01.04.04	Belanja Uang Paket DPRD	86.058.000,00
5.1.01.04.04.0001	Belanja Uang Paket DPRD	86.058.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.04.05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.455.814.500,00
5.1.01.04.05.0001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.455.814.500,00
5.1.01.04.06	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	125.149.500,00
5.1.01.04.06.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	125.149.500,00
5.1.01.04.07	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	29.780.100,00
5.1.01.04.07.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	29.780.100,00
5.1.01.04.08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	7.938.000.000,00
5.1.01.04.08.0001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	7.938.000.000,00
5.1.01.04.09	Belanja Tunjangan Reses DPRD	1.984.500.000,00
5.1.01.04.09.0001	Belanja Tunjangan Reses DPRD	1.984.500.000,00
5.1.01.04.10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	137.500.000,00
5.1.01.04.10.0001	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	137.500.000,00
5.1.01.04.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	5.550.426.472,00
5.1.01.04.12.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	112.026.472,00
5.1.01.04.12.0002	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	4.800.000,00
5.1.01.04.12.0003	Belanja Jaminan Kematian DPRD	7.200.000,00
5.1.01.04.12.0004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	5.426.400.000,00
5.1.01.04.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	7.074.000.000,00
5.1.01.04.13.0001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	7.074.000.000,00
5.1.01.04.14	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	71.715.000,00
5.1.01.04.14.0001	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	71.715.000,00
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	180.696.229,00
5.1.01.05.01	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	57.153.914,72
5.1.01.05.01.0001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	57.153.914,72
5.1.01.05.02	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	7.359.601,20
5.1.01.05.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	7.359.601,20
5.1.01.05.03	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	100.737.000,00
5.1.01.05.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	100.737.000,00
5.1.01.05.04	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	5.344.596,00
5.1.01.05.04.0001	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	5.344.596,00
5.1.01.05.05	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	3.489.256,15
5.1.01.05.05.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	3.489.256,15
5.1.01.05.06	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	1.834,93
5.1.01.05.06.0001	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	1.834,93
5.1.01.05.07	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	6.610.026,00
5.1.01.05.07.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	6.610.026,00
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	2.577.191.304,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.06.01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	393.120.000,00
5.1.01.06.01.0001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	393.120.000,00
5.1.01.06.02	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	2.184.071.304,00
5.1.01.06.02.0001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	2.184.071.304,00
5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD	63.411.870.500,00
5.1.01.99.99	Belanja Pegawai BLUD	63.411.870.500,00
5.1.01.99.99.9999	Belanja Pegawai BLUD	63.411.870.500,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.026.819.656.322,00
5.1.02.01	Belanja Barang	268.102.724.247,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	266.940.424.247,00
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	451.991.550,00
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	840.518.202,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	7.973.496.615,00
5.1.02.01.01.0005	Belanja Bahan-Bahan Baku	1.336.000,00
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	418.617.400,00
5.1.02.01.01.0009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	90.414.241,00
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	44.700.000,00
5.1.02.01.01.0011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	331.180.000,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	14.029.785.310,00
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	2.230.011.852,00
5.1.02.01.01.0015	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	21.800.000,00
5.1.02.01.01.0016	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	55.850.000,00
5.1.02.01.01.0019	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	8.915.000,00
5.1.02.01.01.0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	34.910.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	17.537.955.590,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	2.725.800,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	17.301.135.989,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	487.890.776,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	142.932.920,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	2.902.406.977,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	5.961.646.967,00
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	86.343.000,00
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	472.371.288,00
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	335.480.600,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	4.946.503.119,00
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	13.339.221.951,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	132.465.220.948,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	3.323.319.500,00
5.1.02.01.01.0044	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	874.371.011,00
5.1.02.01.01.0045	Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	88.211.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	20.833.359.370,00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	3.040.723.000,00
5.1.02.01.01.0054	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	63.930.000,00
5.1.02.01.01.0056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	2.730.440.000,00
5.1.02.01.01.0057	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	11.340.000,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	3.448.588.500,00
5.1.02.01.01.0059	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	305.451.100,00
5.1.02.01.01.0061	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	195.403.000,00
5.1.02.01.01.0062	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	8.000.000,00
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	4.215.829.000,00
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	646.053.590,00
5.1.02.01.01.0065	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	172.216.500,00
5.1.02.01.01.0070	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	197.740.500,00
5.1.02.01.01.0073	Belanja Pakaian KORPRI	1.455.100,00
5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	759.300.000,00
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	1.031.095.625,00
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	704.005.356,00
5.1.02.01.01.0077	Belanja Pakaian Paskibraka	1.774.230.000,00
5.1.02.01.02	Belanja Barang Tak Habis Pakai	61.700.000,00
5.1.02.01.02.0004	Belanja Komponen-Komponen Rambu-Rambu	61.700.000,00
5.1.02.01.04	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	1.100.600.000,00
5.1.02.01.04.0105	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Panen	110.600.000,00
5.1.02.01.04.0511	Belanja Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang	450.000.000,00
5.1.02.01.04.0569	Belanja Gedung dan Bangunan-Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Tugu/Tanda Batas Administrasi	540.000.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	381.255.205.174,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	201.123.355.737,00
5.1.02.02.01.0001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	2.107.000.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	12.299.736.000,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	2.841.460.000,00
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	444.680.000,00
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	53.800.000,00
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	125.360.000,00
5.1.02.02.01.0012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	648.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	19.377.490.000,00
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	5.200.750.000,00
5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	1.507.089.600,00
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	3.544.800.000,00
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	3.114.760.000,00
5.1.02.02.01.0018	Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	2.889.770.000,00
5.1.02.02.01.0019	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	594.600.000,00
5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	673.900.000,00
5.1.02.02.01.0021	Belanja Jasa Tenaga Sumber Daya Air	252.000.000,00
5.1.02.02.01.0022	Belanja Jasa Tenaga Perhubungan	3.336.420.000,00
5.1.02.02.01.0023	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	1.678.310.000,00
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	1.029.400.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	21.918.720.000,00
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	10.036.766.000,00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	8.493.124.000,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	14.480.492.700,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	7.004.360.128,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	7.955.306.500,00
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	97.040.000,00
5.1.02.02.01.0035	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	666.500.000,00
5.1.02.02.01.0036	Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO	83.364.800,00
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	487.800.000,00
5.1.02.02.01.0038	Belanja Jasa Tata Rias	687.700.000,00
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	1.491.200.000,00
5.1.02.02.01.0045	Belanja Jasa Pelayanan Kearsipan	23.712.000,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	1.431.800.000,00
5.1.02.02.01.0048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	3.110.500.000,00
5.1.02.02.01.0049	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	360.000.000,00
5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi	246.117.000,00
5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	4.733.054.400,00
5.1.02.02.01.0052	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	178.150.000,00
5.1.02.02.01.0053	Belanja Jasa Pengukuran Tanah	708.000.000,00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	6.328.180.000,00
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	757.192.140,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	1.943.720.303,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	10.786.268.989,00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	1.372.923.842,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	13.445.852.100,00
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	209.555.000,00
5.1.02.02.01.0065	Belanja Penambahan Daya	15.000.000,00
5.1.02.02.01.0066	Belanja Registrasi/Keanggotaan	4.500.000,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	1.237.320.235,00
5.1.02.02.01.0068	Belanja Rekening Penerangan Jalan Umum	16.995.650.000,00
5.1.02.02.01.0069	Belanja Pengolahan Air Limbah	36.000.000,00
5.1.02.02.01.0073	Belanja Medical Check Up	14.000.000,00
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1.286.480.000,00
5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	777.680.000,00
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	103.700.576.241,00
5.1.02.02.02.0001	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	4.180.475.050,00
5.1.02.02.02.0003	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	88.508.160.000,00
5.1.02.02.02.0004	Belanja Bantuan luran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	1.008.000.000,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	601.118.400,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	5.932.705.000,00
5.1.02.02.02.0008	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	3.470.117.791,00
5.1.02.02.03	Belanja Sewa Tanah	43.500.000,00
5.1.02.02.03.0001	Belanja Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	30.000.000,00
5.1.02.02.03.0035	Belanja Sewa Lapangan Lainnya	13.500.000,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	10.057.006.000,00
5.1.02.02.04.0035	Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	6.580.000,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	5.207.448.000,00
5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	103.700.000,00
5.1.02.02.04.0040	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Khusus	14.000.000,00
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	4.611.413.000,00
5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel	44.490.000,00
5.1.02.02.04.0121	Belanja Sewa Alat Pendingin	41.625.000,00
5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	27.750.000,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	20.320.252.110,00
5.1.02.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	131.620.000,00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	3.446.234.110,00
5.1.02.02.05.0030	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	185.000.000,00
5.1.02.02.05.0041	Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	219.000.000,00
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	16.047.398.000,00
5.1.02.02.05.0050	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	291.000.000,00
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	20.188.320.086,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.02.08.0002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	4.499.561.210,00
5.1.02.02.08.0008	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	1.800.000.000,00
5.1.02.02.08.0009	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	2.944.000.000,00
5.1.02.02.08.0014	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Perkotaan	1.485.000.000,00
5.1.02.02.08.0016	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Lingkungan Bangunan dan Landscape	500.000.000,00
5.1.02.02.08.0018	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	165.861.750,00
5.1.02.02.08.0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	7.599.897.126,00
5.1.02.02.08.0020	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	144.000.000,00
5.1.02.02.08.0021	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air	1.050.000.000,00
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	100.000.000,00
5.1.02.02.09.0014	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	100.000.000,00
5.1.02.02.11	Belanja Beasiswa Pendidikan ASN	3.600.000.000,00
5.1.02.02.11.0001	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1	300.000.000,00
5.1.02.02.11.0002	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	300.000.000,00
5.1.02.02.11.0003	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S3	3.000.000.000,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	21.871.545.000,00
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	8.499.005.000,00
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	7.198.530.000,00
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	4.618.750.000,00
5.1.02.02.12.0004	Belanja Diklat Kepemimpinan	1.555.260.000,00
5.1.02.02.13	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	250.650.000,00
5.1.02.02.13.0015	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	250.650.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	37.836.828.938,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	14.680.892.578,00
5.1.02.03.02.0002	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Grader	33.300.000,00
5.1.02.03.02.0003	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator	325.637.952,00
5.1.02.03.02.0007	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Compacting Equipment	4.163.610,00
5.1.02.03.02.0012	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	95.885.400,00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	7.361.978.964,00
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	1.670.850.000,00
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	419.850.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.03.02.0039	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	135.443.550,00
5.1.02.03.02.0040	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	47.110.000,00
5.1.02.03.02.0096	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Penguji Kendaraan Bermotor	98.600.000,00
5.1.02.03.02.0115	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)	13.539.852,00
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	579.106.152,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	1.318.965.325,00
5.1.02.03.02.0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	446.890.000,00
5.1.02.03.02.0148	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Lainnya	251.000.000,00
5.1.02.03.02.0237	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya	544.000.000,00
5.1.02.03.02.0347	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Laboratorium Lingkungan	45.000.000,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	686.846.273,00
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	335.725.500,00
5.1.02.03.02.0451	Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Alat Pelindung Lainnya	72.000.000,00
5.1.02.03.02.0493	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Tidak Bersuar	195.000.000,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	19.355.936.360,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	8.057.148.360,00
5.1.02.03.03.0002	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang	29.988.000,00
5.1.02.03.03.0006	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	9.500.000.000,00
5.1.02.03.03.0011	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Olahraga	14.000.000,00
5.1.02.03.03.0018	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	90.000.000,00
5.1.02.03.03.0032	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum	199.800.000,00
5.1.02.03.03.0036	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	490.000.000,00
5.1.02.03.03.0038	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I	800.000.000,00
5.1.02.03.03.0039	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan II	175.000.000,00
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	3.800.000.000,00
5.1.02.03.04.0003	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	1.500.000.000,00
5.1.02.03.04.0013	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kabupaten	500.000.000,00
5.1.02.03.04.0026	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembawa Irigasi	500.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.03.04.0048	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	300.000.000,00
5.1.02.03.04.0053	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pelengkap Pengaman Sungai	1.000.000.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	198.933.040.971,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	198.933.040.971,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	198.933.040.971,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	6.981.070.000,00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	6.323.200.000,00
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	4.721.000.000,00
5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	65.000.000,00
5.1.02.05.01.0003	Belanja Beasiswa	1.537.200.000,00
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	657.870.000,00
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	657.870.000,00
5.1.02.89	Belanja Barang dan Jasa BOSP	58.641.993.215,00
5.1.02.89.01	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS	58.190.226.215,00
5.1.02.89.01.0001	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Reguler	58.190.226.215,00
5.1.02.89.02	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD	270.683.000,00
5.1.02.89.02.0001	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD Reguler	270.683.000,00
5.1.02.89.03	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP Kesetaraan	181.084.000,00
5.1.02.89.03.0001	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	181.084.000,00
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	75.068.793.777,00
5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	75.068.793.777,00
5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	75.068.793.777,00
5.1.03	Belanja Bunga	7.000.000.000,00
5.1.03.04	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	7.000.000.000,00
5.1.03.04.06	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMD-Jangka Panjang	7.000.000.000,00
5.1.03.04.06.0001	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMD-Jangka Panjang	7.000.000.000,00
5.1.05	Belanja Hibah	75.493.238.000,00
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	44.924.996.000,00
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	44.424.996.000,00
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	44.424.996.000,00
5.1.05.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	500.000.000,00
5.1.05.05.02.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	500.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.05.06	Belanja Hibah Dana BOS	17.835.142.000,00
5.1.05.06.01	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri	8.074.272.000,00
5.1.05.06.01.0001	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri	8.074.272.000,00
5.1.05.06.02	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	9.760.870.000,00
5.1.05.06.02.0001	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	9.760.870.000,00
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	4.002.900.000,00
5.1.05.07.01	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	4.002.900.000,00
5.1.05.07.01.0001	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	4.002.900.000,00
5.1.05.08	Belanja Hibah Dana BOSP	8.730.200.000,00
5.1.05.08.01	Belanja Hibah Dana BOSP-BOS	41.400.000,00
5.1.05.08.01.0001	Belanja Hibah Dana BOSP-BOS	41.400.000,00
5.1.05.08.02	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD	6.699.000.000,00
5.1.05.08.02.0001	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD	6.699.000.000,00
5.1.05.08.03	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan	1.989.800.000,00
5.1.05.08.03.0001	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan	1.989.800.000,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	3.709.500.000,00
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	3.709.500.000,00
5.1.06.01.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	3.709.500.000,00
5.1.06.01.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	3.709.500.000,00
5.2	BELANJA MODAL	808.261.664.663,00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	52.200.000.000,00
5.2.01.01	Belanja Modal Tanah	52.200.000.000,00
5.2.01.01.01	Belanja Modal Tanah Persil	41.500.000.000,00
5.2.01.01.01.0004	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	4.000.000.000,00
5.2.01.01.01.0007	Belanja Modal Tanah Persil Lainnya	37.500.000.000,00
5.2.01.01.03	Belanja Modal Lapangan	10.700.000.000,00
5.2.01.01.03.0013	Belanja Modal Tanah untuk Taman	10.700.000.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	169.458.389.893,00
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	3.350.682.000,00
5.2.02.01.01	Belanja Modal Alat Besar Darat	3.307.682.000,00
5.2.02.01.01.0003	Belanja Modal Excavator	1.650.000.000,00
5.2.02.01.01.0012	Belanja Modal Alat Besar Darat Lainnya	1.657.682.000,00
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	43.000.000,00
5.2.02.01.03.0005	Belanja Modal Pompa	43.000.000,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	17.181.661.600,00
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	16.903.682.600,00
5.2.02.02.01.0001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	9.246.380.000,00

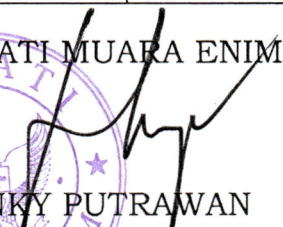
KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.02.02.01.0002	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	1.336.440.000,00
5.2.02.02.01.0003	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	3.987.862.600,00
5.2.02.02.01.0005	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	333.000.000,00
5.2.02.02.01.0006	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	2.000.000.000,00
5.2.02.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	277.979.000,00
5.2.02.02.02.0001	Belanja Modal Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	277.979.000,00
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	42.000.000,00
5.2.02.03.03	Belanja Modal Alat Ukur	42.000.000,00
5.2.02.03.03.0021	Belanja Modal Alat Ukur Lainnya	42.000.000,00
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	1.336.945.000,00
5.2.02.04.01	Belanja Modal Alat Pengolahan	1.336.945.000,00
5.2.02.04.01.0001	Belanja Modal Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	54.945.000,00
5.2.02.04.01.0006	Belanja Modal Alat Processing	45.000.000,00
5.2.02.04.01.0009	Belanja Modal Alat-Alat Peternakan	1.180.000.000,00
5.2.02.04.01.0010	Belanja Modal Alat Pengolahan Lainnya	57.000.000,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	17.272.828.903,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	2.429.129.480,00
5.2.02.05.01.0003	Belanja Modal Alat Reproduksi (Penggandaan)	90.000.000,00
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	880.703.680,00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	1.458.425.800,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	14.843.699.423,00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	9.002.556.493,00
5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih	116.756.800,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	2.230.822.760,00
5.2.02.05.02.0005	Belanja Modal Alat Dapur	2.000.000,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	3.462.775.970,00
5.2.02.05.02.0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	28.787.400,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	1.249.542.150,00
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	738.462.150,00
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	243.158.300,00
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	461.583.850,00
5.2.02.06.01.0006	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	33.720.000,00
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	60.000.000,00
5.2.02.06.02.0001	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	60.000.000,00
5.2.02.06.03	Belanja Modal Peralatan Pemancar	451.080.000,00
5.2.02.06.03.0047	Belanja Modal Sumber Tenaga	451.080.000,00
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	19.052.469.859,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	19.052.469.859,00
5.2.02.07.01.0001	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	9.894.281.218,00
5.2.02.07.01.0002	Belanja Modal Alat Kedokteran Gigi	800.000.000,00
5.2.02.07.01.0004	Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah	2.000.000.000,00
5.2.02.07.01.0014	Belanja Modal Alat Kedokteran Jantung	317.710.000,00
5.2.02.07.01.0015	Belanja Modal Alat Kedokteran Radiodiagnostic	5.864.737.441,00
5.2.02.07.01.0021	Belanja Modal Alat Kedokteran Gawat Darurat	12.000.000,00
5.2.02.07.01.0029	Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya	163.741.200,00
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	40.088.103.300,00
5.2.02.08.01	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	768.603.300,00
5.2.02.08.01.0011	Belanja Modal Alat Laboratorium Umum	768.603.300,00
5.2.02.08.03	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	39.312.000.000,00
5.2.02.08.03.0016	Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya	39.312.000.000,00
5.2.02.08.04	Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	7.500.000,00
5.2.02.08.04.0005	Belanja Modal System/Power Supply	7.500.000,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	38.596.437.275,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	33.985.475.975,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	33.926.285.975,00
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	59.190.000,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	4.610.961.300,00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	903.236.300,00
5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	3.626.325.000,00
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	81.400.000,00
5.2.02.15	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	295.000.000,00
5.2.02.15.02	Belanja Modal Alat Pelindung	295.000.000,00
5.2.02.15.02.0001	Belanja Modal Baju Pengaman	295.000.000,00
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu	416.458.800,00
5.2.02.18.01	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	416.458.800,00
5.2.02.18.01.0001	Belanja Modal Rambu Bersuar	173.200.000,00
5.2.02.18.01.0002	Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar	193.258.800,00
5.2.02.18.01.0003	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	50.000.000,00
5.2.02.19	Belanja Modal Peralatan Olahraga	100.000.000,00
5.2.02.19.01	Belanja Modal Peralatan Olahraga	100.000.000,00
5.2.02.19.01.0006	Belanja Modal Peralatan Olahraga Lainnya	100.000.000,00
5.2.02.89	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP	16.521.076.122,00
5.2.02.89.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS	16.469.260.122,00
5.2.02.89.01.0001	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS Reguler	16.469.260.122,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.02.89.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOP PAUD	13.000.000,00
5.2.02.89.02.0001	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOP PAUD Reguler	13.000.000,00
5.2.02.89.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOP Kesetaraan	38.816.000,00
5.2.02.89.03.0001	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	38.816.000,00
5.2.02.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	13.955.184.884,00
5.2.02.99.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	13.955.184.884,00
5.2.02.99.99.9999	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	13.955.184.884,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	295.672.434.873,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	286.854.929.873,00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	279.340.454.873,00
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	57.695.181.487,00
5.2.03.01.01.0002	Belanja Modal Bangunan Gudang	230.115.000,00
5.2.03.01.01.0006	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	111.343.153.818,00
5.2.03.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	62.738.193.120,00
5.2.03.01.01.0011	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga	3.350.000.000,00
5.2.03.01.01.0012	Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	26.470.000.000,00
5.2.03.01.01.0013	Belanja Modal Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	86.000.000,00
5.2.03.01.01.0015	Belanja Modal Bangunan Gedung Pemotong Hewan	7.700.000.000,00
5.2.03.01.01.0018	Belanja Modal Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	789.630.000,00
5.2.03.01.01.0029	Belanja Modal Bangunan Peternakan/Perikanan	510.600.000,00
5.2.03.01.01.0030	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	280.000.000,00
5.2.03.01.01.0032	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	3.819.229.400,00
5.2.03.01.01.0033	Belanja Modal Bangunan Parkir	466.388.000,00
5.2.03.01.01.0036	Belanja Modal Taman	2.821.964.048,00
5.2.03.01.01.0037	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	1.040.000.000,00
5.2.03.01.02	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	7.514.475.000,00
5.2.03.01.02.0003	Belanja Modal Rumah Negara Golongan III	1.189.475.000,00
5.2.03.01.02.0013	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	6.325.000.000,00
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	6.941.640.000,00
5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	6.941.640.000,00
5.2.03.04.01.0001	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas Administrasi	551.000.000,00
5.2.03.04.01.0004	Belanja Modal Pagar	6.390.640.000,00
5.2.03.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	1.875.865.000,00
5.2.03.99.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	1.875.865.000,00
5.2.03.99.99.9999	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	1.875.865.000,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	279.032.429.234,00
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	180.999.496.800,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	164.899.496.800,00
5.2.04.01.01.0003	Belanja Modal Jalan Kabupaten	151.425.212.800,00
5.2.04.01.01.0009	Belanja Modal Jalan Khusus	350.000.000,00
5.2.04.01.01.0010	Belanja Modal Jalan Lainnya	13.124.284.000,00
5.2.04.01.02	Belanja Modal Jembatan	16.100.000.000,00
5.2.04.01.02.0003	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten	16.100.000.000,00
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	81.285.496.260,00
5.2.04.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	23.684.000.000,00
5.2.04.02.01.0003	Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi	23.684.000.000,00
5.2.04.02.04	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	50.322.296.260,00
5.2.04.02.04.0004	Belanja Modal Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	23.200.000.000,00
5.2.04.02.04.0005	Belanja Modal Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai	27.122.296.260,00
5.2.04.02.06	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku	33.300.000,00
5.2.04.02.06.0006	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	33.300.000,00
5.2.04.02.07	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	7.245.900.000,00
5.2.04.02.07.0003	Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Kotor	7.245.900.000,00
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	304.916.835,00
5.2.04.03.01	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku	150.000.000,00
5.2.04.03.01.0005	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	150.000.000,00
5.2.04.03.06	Belanja Modal Instalasi Gardu Listrik	154.916.835,00
5.2.04.03.06.0004	Belanja Modal Instalasi Gardu Listrik Lainnya	154.916.835,00
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	16.442.519.339,00
5.2.04.04.02	Belanja Modal Jaringan Listrik	16.442.519.339,00
5.2.04.04.02.0003	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	16.442.519.339,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	11.218.410.663,00
5.2.05.89	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP	11.218.410.663,00
5.2.05.89.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS	11.218.410.663,00
5.2.05.89.01.0001	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS Reguler	11.218.410.663,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	680.000.000,00
5.2.06.01	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	680.000.000,00
5.2.06.01.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	680.000.000,00
5.2.06.01.01.0005	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software	170.000.000,00
5.2.06.01.01.0006	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Kajian	510.000.000,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	5.000.000.000,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000,00
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000,00
5.3.01.01.01	Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.3.01.01.01.0001	Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000,00
5.4	BELANJA TRANSFER	491.069.224.466,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	35.822.973.597,00
5.4.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	17.655.436.365,00
5.4.01.01.03	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	17.655.436.365,00
5.4.01.01.03.0001	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	17.655.436.365,00
5.4.01.02	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	18.167.537.232,00
5.4.01.02.01	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	18.167.537.232,00
5.4.01.02.01.0001	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	18.167.537.232,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	455.246.250.869,00
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	455.246.250.869,00
5.4.02.05.02	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	455.246.250.869,00
5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	3.961.705.935,00
5.4.02.05.02.0004	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Dana Desa	216.038.404.000,00
5.4.02.05.02.0005	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa	235.246.140.934,00
	Jumlah Belanja	3.616.508.009.716,00
	Total Surplus/(Defisit)	-151.259.467.146,00
6	PEMBIAYAAN DAERAH	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	157.537.983.278,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	157.537.983.278,00
6.1.01.05	Penghematan Belanja	157.537.983.278,00
6.1.01.05.01	Penghematan Belanja-Belanja Operasi	157.537.983.278,00
6.1.01.05.01.0007	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Barang	157.537.983.278,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	6.278.516.132,00
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	6.278.516.132,00
6.2.03.01	Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat	6.278.516.132,00
6.2.03.01.01	Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat-Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Menengah	6.278.516.132,00
6.2.03.01.01.0001	Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat-Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Menengah	6.278.516.132,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	6.278.516.132,00
	Pembiayaan Netto	151.259.467.146,00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00

Pj. BUPATI MUARA ENIM

HENKY PUTRAWAN